PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI SAMSAT UPTB PALEMBANG 1

Arin Karenina¹, Endang Sri Mulatsih², Wandestarido³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Darma Pratama

E-mail : kareninarin01@gmail.com¹, endangsrimumulatsih21@gmail.com², wandestarido@gmail.com³

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana seseorang tunduk dan taat menjalankan suatu aturan, dalam hal ini aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sikap, hukuman/sanksi, pendapatan, pendidikan, pengetahuan, program atau kebijakan pemerintah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak dan sanksi perpajakan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1. Sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 100 orang wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial dapat dijelaskan variabel program pemutihan pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), variabel sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil secara simultan menyatakan minimal ada satu variabel bebas yaitu program pemutihan pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan program pemutihan pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) menjelaskan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 41,5% sedangkan sisanya 58,5% ($100\% - 41,5\%$) dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan selanjutnya dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti yang lain.

Kata Kunci : Program pemutihan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a condition in which an individual adheres to and obeys a set of rules, in this case rules based on taxation laws. Factors influencing taxpayer compliance include attitudes, sanctions, income, education, knowledge, government programs, or policies. The objective of this research is to determine the partial and simultaneous influence of tax amnesty programs and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers registered at SAMSAT UPTB Palembang 1. The sample for this study consists of 100 taxpayers registered at SAMSAT UPTB Palembang 1. The data analysis methods employed in this research are descriptive and verificative. The research findings indicate that partially, the variable of tax amnesty programs (X_1) significantly influences taxpayer compliance (Y), and the variable of tax sanctions (X_2) significantly influences taxpayer compliance (Y). Simultaneously, the results state that at least one independent variable namely tax amnesty programs (X_1) and tax sanctions (X_2) influence the compliance of motor vehicle taxpayers (Y) registered at SAMSAT UPTB Palembang 1. The coefficient of determination (R^2) indicates that tax amnesty programs (X_1) and tax sanctions (X_2) explain taxpayer compliance (Y) by 41.5%, while the remaining 58.5% ($100\% - 41.5\%$) can be explained by other variables not examined in this research and may be further explored by other researchers.

Keywords : Tax amnesty programs, tax sanctions, taxpayer compliance

I. PENDAHULUAN

Pemungutan pajak telah berlangsung selama ribuan tahun di berbagai penjuru dunia. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan suatu negara termasuk negara Indonesia, khususnya di dalam pelaksanaan

pembangunan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan negara, dengan pemungutan pajak pemerintah bisa mendapatkan sumber pendanaan yang dapat menghasilkan operasi berkelanjutan untuk

program sosial dan investasi publik. Pembayaran pajak membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat (Kowel, Kalangi, dan Tangkuman, 2019).

Pajak merupakan pungutan yang bersifat terutang yang wajib di bayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, serta tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasil pungutannya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan (Siahaan, 2013:7).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia 2022). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Menunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) merupakan instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Kementerian Keuangan, 2022).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena memiliki potensi penerimaan yang cukup besar. Potensi tersebut didukung dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor setiap tahunnya, sehingga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan wajib pajak (Langgeng et al., 2018).

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah tindakan patuh dan sadarnya seseorang terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Yang et al., 2022).

Menurut Widajantie et al., (2019) Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib

pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bagi negara Indonesia yang menganut self assesment system, di mana pada keseluruhan prosesnya seperti perhitungan, pembayaran, serta pelaporan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, kepatuhan wajib pajak ini memegang peran yang sangat penting (Yulianto, 2019).

Menurut Oladipupo et al., (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara-negara berkembang, seperti sikap, hukuman/sanksi, pendapatan, pendidikan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia wajib pajak, korupsi, tarif pajak marjinal yang tinggi, kurangnya ketersediaan informasi dan sistem akuntansi, sektor informal yang besar, sistem peraturan yang lemah, ambiguitas dalam hukum pajak, adanya budaya yang tidak patuh, dan ketidakefektifan administrasi perpajakan. Adapun menurut Listyowati, Samrotun, dan Suhendro, (2018) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak.

Pemutihan pajak merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan memberikan kemudahan atau keringanan berupa penghapusan denda atau sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang mempunyai hutang pajak kendaraan bermotor (Yulianto & Rahayu, 2022).

Selain program pemutihan pajak faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah perbuatan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia baik sengaja maupun tidak sengaja (Sari, Sunaryo, dan Kusumawardhani, 2021).

Dilansir dari Tribun Sumsel, 2022 bahwa Empat Hari Razia Pajak Kendaraan di Palembang, pada tanggal 15 September 2022 UPTB Samsat Palembang 1 mengadakan operasi kepatuhan atau Razia pajak kendaraan bermotor di beberapa titik yang ada di kota Palembang. "Ini sebagai bentuk upaya kita mengingatkan masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya," Yani

Rohayani saat operasi kepatuhan di jalan jenderal sudirman. Yani melanjutkan perhari kisaran 80-100 kendaraan distop dan masih banyak yang belum taat pajak. “Untuk yang menunggak didominasi kendaraan bermotor. Berbagai alasan belum bayar pajak disampaikan pengendara. Diantaranya karena

alasan ekonomi, lupa jatuh tempo pajak kendaraan dan lainnya,” ungkapnya. Menurutnya, operasi kepatuhan ini juga sekaligus mensosialisasikan program keringanan pajak kendaraan bermotor (Tribun Sumsel, 2022).

Berikut data jumlah pendapatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat UPTB Palembang 1 tahun 2018-2022.

Tabel 1
Data Jumlah Pendapatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT UPTB Palembang 1 Tahun 2018-2022

Tahun	Roda 2	Roda 4	Jumlah
2018	Rp. 1.834.064.000	Rp. 5.247.761.010	Rp. 7.081.825.010
2019	Rp. 5.081.165.175	Rp. 15.271.066.967	Rp. 20.352.323.142
2020	Rp. 7.872.710.575	Rp. 34.026.349.500	Rp. 41.899.060.075
2021	Rp. 12.745.440.825	Rp. 49.527.870.250	Rp. 62.273.311.075
2022	Rp. 12.237.600.000	Rp. 11.560.400.000	Rp. 23.798.000.000

Sumber : BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Berdasarkan data tabel 1 pada tahun 2022 pendapatan pembayaran pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Hal ini berarti masih banyak masyarakat Kota Palembang yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2
Data Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1 Tahun 2022

KECAMATAN	WP	WP. PATUH	WP. TIDAK PATUH	
	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	%
ILIR BARAT I	60.131	44.745	15.386	25,58
ILIR BARAT II	41.151	33.295	7.856	19,09
BUKIT KECIL	38.424	31.045	7.379	19,20
ILIR TIMUR I	23.647	19.595	4.052	17,13
TOTAL	163.353	128.680	34.673	21,22

Sumber : BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Dapat dilihat dari tabel 2 untuk wilayah UPTB Palembang 1 masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga target yang dibuat pemerintah kota Palembang tidak tercapai, wajib pajak tidak patuh merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor di UPTB Palembang 1.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan, tetapi memiliki hasil yang berbeda-beda. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ammy, (2023) dan Widajantie & Anwar, (2020) menyatakan bahwa program pemutihan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Leo et al., (2022) menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widajantie et al., (2019) dan Barlan, Laekkeng, dan Sari, (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Virgiawati, Samin, dan Kirana, (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROGRAM**

PEMUTIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI SAMSAT UPTB PALEMBANG 1”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional

Program Pemutihan Pajak

Menurut Ammy, (2023) Pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan nasional yang ditujukan untuk mengidentifikasi pembayar pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka dengan tidak membayar atau membebaskan tunggakan untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Rahayu & Amirah, (2018) dimensi dan indikator dari Program pemutihan wajib pajak, yaitu :

a) *Sunset policy*

Program pembebasan sanksi administrasi pajak

b) Kesadaran wajib pajak

1. Hak dan kewajiban
2. Kepercayaan masyarakat
3. Dorongan dari diri sendiri

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo, (2018:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Wardani & Rumiyatun, (2017) dimensi dan indikator dari sanksi perpajakan, yaitu :

1. Tujuan sanksi

Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.

2. Pengenaan sanksi

Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak

3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu, (2020:189) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak

dalam memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Wardani & Asis, (2017) dimensi dan indikator dari kepatuhan wajib pajak, yaitu :

a. Ketepatan

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.
3. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.

b. Ketaatan

1. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya.
2. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.
3. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan.

Locus Penelitian

Locus penelitian ini adalah di SAMSAT UPTB Palembang 1 Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai, 26 Ilir Barat 1.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT UPTB Palembang 1.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1 sebanyak 163.353 wajib pajak tahun 2022.

Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu adalah metode yang memiliki masalah dalam penelitian harus sudah ada dan

jelas serta metode ini menggambarkan hasilnya dengan berupa angka – angka (Sugiyono, 2018:15).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yang digunakan yaitu program pemutihan pajak dan sanksi perpajakan. Berikut ini adalah tabel hasil analisis regresi linier berganda :

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.077	3.101		2.605	.011
	Program Pemutihan Pajak (X1)	.302	.127	.187	2.370	.020
	Sanksi Perpajakan (X2)	.913	.123	.585	7.414	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS *Statistic Ver. 22*

Berdasarkan hasil *output software* SPSS pada tabel 3 didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 8,077 + 0,302X_1 + 0,913X_2 + e$$

Dimana :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Program Pemutihan Pajak
- X2 : Sanksi Perpajakan
- a : Konstanta
- b1b2 : Koefisien Regresi
- e : error

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 8,077; artinya apabila semua variabel independen program pemutihan pajak (X₁) dan sanksi perpajakan (X₂) nilainya 0, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya 8,077.
2. Koefisien regresi variabel program pemutihan pajak (X₁) dengan nilai 0,302; artinya jika program pemutihan pajak mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,302 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara program pemutihan pajak

dengan kepatuhan wajib pajak, semakin naik program keputihan pajak, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

3. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X₂) dengan nilai 0,913; artinya jika sanksi perpajakan mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,913 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, semakin naik sanksi perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas variabel program pemutihan pajak (X₁) dan sanksi perpajakan (X₂) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1.

Adapun hasil dari uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.077	3.101		2.605	.011
	Program Pemutihan Pajak (X1)	.302	.127	.187	2.370	.020
	Sanksi Perpajakan (X2)	.913	.123	.585	7.414	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS *Statistic Ver. 22*

Berdasarkan tabel 4 di atas hasil uji parsial (Uji t) di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Variabel Program Pemutihan Pajak (X₁)

Hasil pengujian diperoleh t_{hitung} sebesar 2,370 dengan nilai signifikan sebesar 0,020 dan t_{tabel} yang dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikan $0,05/2 = 0,025$, dengan derajat kebebasan $df\ 2\ (n-k-1)$ atau $100-3-1 = 96$, hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar $\pm 1,985$, nilai $t_{hitung}\ (2,370) > t_{tabel}\ (1,985)$, dan nilai signifikan $0,020 < 0,05$, sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya program pemutihan pajak (X₁) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1.

2. Variabel Sanksi Perpajakan (X₂)

Hasil pengujian diperoleh t_{hitung} sebesar 7,414 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan t_{tabel} yang dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikan $0,05/2 = 0,025$,

dengan derajat kebebasan $df\ 2\ (n-k-1)$ atau $100-3-1 = 96$, hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar $\pm 1,985$, nilai $t_{hitung}\ (7,414) > t_{tabel}\ (1,985)$, dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya sanksi perpajakan (X₂) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1.

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat secara bersama-sama apakah ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Metode yang digunakan uji F terhadap signifikan model regresi yang menunjukkan mampu tidaknya model atau persamaan yang terbentuk dalam memprediksi nilai variabel terikat dengan tepat. Adapun hasil dari uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	663.063	2	331.531	36.136	.000 ^b
Residual	889.937	97	9.175		
Total	1553.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Program Pemutihan Pajak (X1)

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS *Statistic Ver. 22*

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 5 diperoleh F_{hitung} sebesar 36,136 dengan tingkat

nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan tingkat kesalahan 0,05 dengan $df\ 2\ (n-k-1)$ atau $100-3-1 = 96$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah

jumlah variabel independen), hasil yang diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,091 (lihat pada lampiran *F Table Statistics*). Jadi dapat kesimpulannya F_{hitung} (36,136) > F_{tabel} (3,091), dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak atau menerima hipotesis alternatif artinya minimal ada satu variabel bebas (program pemutihan pajak dan sanksi perpajakan) berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi untuk variabel bebas lebih dari dua digunakan *Adjusted R Square* sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Deteminasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.653 ^a	.427	.415	3.029

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X₂), Program Pemutihan Pajak (X₁)

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS *Statistic Ver. 22*

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,415 (41,5%). Hal ini berarti bahwa variabel program pemutihan pajak (X₁) dan sanksi perpajakan (X₂) menjelaskan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 41,5%, sedangkan sisanya 58,5% (100% - 41,5%) dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Program Pemutihan Pajak (X₁) Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1.

Variabel program pemutihan pajak (X₁) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) hasil diperoleh thitung sebesar 2,370 dengan nilai signifikan sebesar 0,020, nilai thitung (2,370) > ttabel (1,985) dan nilai signifikan 0,020 < 0,05 dengan koefisien regresi 0,302 (positif) artinya hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, dengan demikian secara parsial variabel program pemutihan pajak (X₁) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1. Hal ini menunjukkan bahwa adanya program pemutihan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini sejalan dengan penelitian Widajantie & Anwar, (2020) dan Ammy,

(2023) yang menyatakan bahwa program pemutihan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Leo et al., (2022) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X₂) Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1.

Variabel sanksi perpajakan (X₂) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) hasil diperoleh thitung sebesar 7,414 dengan nilai signifikan sebesar 0,000, nilai thitung (7,414) > ttabel (1,985) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dengan koefisien regresi 0,913 (positif) artinya hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, dengan demikian secara parsial variabel sanksi perpajakan (X₂) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widajantie et al., (2019) dan

Barlan et al., (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Virgiawati et al., (2019) menyatakan bahwa secara parsial sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Program Pemutihan Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1.

Variabel program pemutihan pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat disimpulkan $F_{hitung} (36,136) > F_{tabel} (3,091)$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ artinya hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya minimal ada satu variabel bebas (program pemutihan pajak dan sanksi perpajakan) yang berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yustriawan, Tri, dan Sirait, (2022) dengan hasil uji F maka dapat disimpulkan bahwa F_{hitung} dalam penelitian ini yaitu 8,900 yang artinya lebih besar dari F_{tabel} yang hanya 2,699. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Deskripsi program pemutihan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1
 - a. Program pemutihan pajak di SAMSAT UPTB Palembang 1 dengan nilai rata-rata sebesar 4,44, dimana sebagian responden setuju bahwa program pemutihan pajak memberikan

pengaruh positif kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

- b. Sanksi perpajakan di SAMSAT UPTB Palembang 1 dengan nilai rata-rata sebesar 4,22 dimana sebagian responden setuju bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotor.
 - c. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT UPTB Palembang 1 dengan nilai rata-rata sebesar 4,27 dimana kepatuhan responden terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.
2. Hasil Uji t (secara parsial) dapat dijelaskan program pemutihan pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1. Hal ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 3. Hasil Uji F menunjukkan secara simultan variabel program pemutihan pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dimana hasil diperoleh $F_{hitung} (36,136) > F_{tabel} (3,091)$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya minimal ada satu variabel bebas (program pemutihan pajak dan sanksi perpajakan) yang berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT UPTB Palembang 1.
 4. Hasil Koefisien determinasi *Adjusted R Square* diperoleh adalah 0,415 (41,5%) berarti bahwa variabel program pemutihan pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) menjelaskan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 41,5% sedangkan sisanya 58,5% ($100\% - 41,5\%$) dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan selanjutnya dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti yang lain.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi SAMSAT UPTB Palembang 1 diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan tata cara serta pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak terutama pajak daerah dengan cara memberikan penyuluhan secara gratis bagi para wajib pajak baru atau secara berkala mengenai pelaksanaan sanksi perpajakan agar wajib pajak memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak. Serta melakukan *broadcast* via sosial media atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat bahwa adanya sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah yaitu Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam dengan menambahkan variabel independen lainnya misalnya modernisasi sistem administrasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pelayanan fiskus serta variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di beberapa kantor SAMSAT dengan tujuan untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana pengaruh dan sikap para wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V7I1.1257>
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/ADZ-DZAHAB.V6I2.698>
- Kementerian Keuangan, R. I. (2022). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260. <https://doi.org/10.35794/EMBA.V7I3.25060>
- Langgeng, A., Syah, N., Kamal, B., & Sari, M. K. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL. *JURNAL EKUIVALENSI*, 4(2), 258–277. <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/161>
- Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2796–2807. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V6I3.953>
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*, 3(1), 372–395. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/>

- article.php?article=596908&val=9736&title=FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
- Oladipupo, A. O., Obazee, U., Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.4236/IB.2016.81001>
- Sari, H. I., Sunaryo, K., & Kusumawardhani, I. (2021). THE EFFECT OF UNDERSTANDING OF TAX REGULATIONS, TAX SANCTIONS AND TAX RATES ON SMALL MEDIUM ENTERPRISES TAX COMPLIANCE IN BANTUL REGENCY. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 16(1), 85–100. <https://doi.org/10.25105/JIPAK.V16I1.6779>
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Revisi). PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tribun Sumsel. (2022, September 15). *Empat Hari Razia Pajak Kendaraan di Palembang, Penunggak Didominasi Kendaraan Ini - Tribunsumsel.com*. <https://sumsel.tribunnews.com/2022/09/15/empat-hari-razia-pajak-kendaraan-di-palembang-penunggak-didominasi-kendaraan-ini>
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan). *Monex: Journal of Accounting Research*, 8(2). <https://doi.org/10.30591/MONEX.V8I2.1234>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT SURABAYA SELATAN). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/BAJ.V3I2.103>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS KANTOR BERSAMA SAMSAT SURABAYA SELATAN). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/BAJ.V2I1.38>
- Yang, F.-F., Kepatuhan, M., Pajak, W., Dwi, K. B., Ningsih, I., Putri, A. A., Marlina, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Riau, U. M. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), 190–199. <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/112>
- Yulianto. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16568>
- Yulianto, A. eko, & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.38156/IMKA.V2I1.110>
- Yustriawan, D., Tri, D., & Sirait, M. (2022). Deskripsi Pengetahuan Pajak, Sanki Pajak dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional USM*, 3(1), 198–207. <https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/5202>